

RENCANA STRATEGIS

Kecamatan Pontianak Timur

Tahun 2025 – 2029

DISUSUN OLEH :
SUB BAGIAN PEERENCANAAN
DAN KEUANGAN



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan.....	II-1
a. Tugas, Fungsi dan Struktur.....	II-1
b. Sumber Daya	II-6
c. Kinerja Pelayanan.....	II-9
d. Kelompok Sasaran Layanan.....	II-14
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-15
a. Permasalahan Pelayanan	II-15
b. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	II-17
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN....	III-1
1. Tujuan Rencana Strategis.....	III-1
2. Sasaran Rencana Strategis.....	III-2
3. Strategi Rencana Strategis.....	III-6
4. Arah Kebijakan Rencana Strategis.....	III-9
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV-1
BAB V PENUTUP.....	V-1

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Visi, Misi dan Program Wali Kota Pontianak yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maksud Penyusunan Renstra adalah untuk memberikan tujuan, sasaran, strategi serta program prioritas bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dengan selesainya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025-2029, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai masukan, baik berupa data, informasi maupun saran-saran yang dapat membantu keberhasilan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025-2029. dengan harapan di masa mendatang Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur untuk menjawab tantangan masa depan.

Dokumen Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak disusun sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2025-2029.

Akhir kata semoga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025–2029 ini dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya urusan Kecamatan.

Pontianak, September 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Perencanaan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak tahun 2025-2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, baik evaluasi Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kota Pontianak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kecamatan

Pontianak Timur Kota Pontianak dituntut untuk mampu menerjemahkan ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Kemana Pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang;
2. Bagaimana cara mencapainya, dan;
3. Langkah-langka strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, Penyusunan Rancangan Awal Renstra, Penyusunan Rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak untuk 5 (lima) tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2025 sampai dengan 2029.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4).
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228).
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227).

16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontinak Nomor 234).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025-2029 disusun untuk melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisiensi, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan penyusunam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pointianak Timur Kota Pontianak adalah menyelaraskan dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar penyelenggaraan urusan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2024, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2024, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selain itu tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah:

1. Tersedianya dokumen Perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Wali Kota Pontianak untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Pontianak.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak selama 5 (lima) tahun mendatang.
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak ini disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Rencana Strategis (Renstra) ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kota Pontianak.

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Permasalahan Pelayanan

1.2 Isu Strategis

1.3 Strategi

1.4 Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub. Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu Indikatif

4.4 Uraian Sub. Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.6 Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan

a. Tugas, Fungsi dan Struktur

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dalam Peraturan WaliKota Pontianak Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak.

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan.

Camat mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b) Perumusan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- c) Penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan kecamatan;
- d) Pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan kecamatan;
- e) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat).

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b) Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c) Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- d) Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;

- e) Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- f) Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

Ruang lingkup tugas bidang kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum Dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian;
- b) Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian umum dan aparatur meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, penataan kelembagaan perangkat daerah, pelayanan data dan informasi, administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;
- b) Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan; dan

- e) Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/kegiatan, administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran dan pembinaan teknis terhadap fungsional tertentu bidang keuangan, pelaporan perangkat daerah, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja dibidang Pemerintahan;
- b) Penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- c) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain dibidang Pemerintahan yang diberikan oleh Camat.

Ruang lingkup tugas seksi pemerintahan meliputi fasilitasi pembinaan politik dalam negeri, fasilitasi kegiatan ormas yang berkaitan dengan ideologi dan kesatuan bangsa, administrasi kependudukan, fasilitasi administrasi fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset pemerintah daerah di kecamatan, fasilitasi pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul yang tidak memenuhi peraturan di bidang pertanahan di kecamatan, fasilitasi koordinasi instansi vertikal, pembinaan kelurahan serta fasilitasi pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW).

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan masyarakat;

- b) Penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

Ruang lingkup tugas seksi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi partisipasi masyarakat, fasilitasi pembinaan umat beragama, fasilitasi pembinaan generasi muda, lansia dan olahraga, fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan, fasilitasi kesehatan lingkungan.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban;
- b) Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- c) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain dibidang ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh Camat;

Ruang lingkup tugas seksi ketentraman dan ketertiban meliputi fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi penegakan peraturan daerah, fasilitasi dan pengawasan pedagang informal, koordinasi dan fasilitasi penanggulangan bencana, fasilitasi kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan, dan fasilitasi pengamanan aset daerah.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

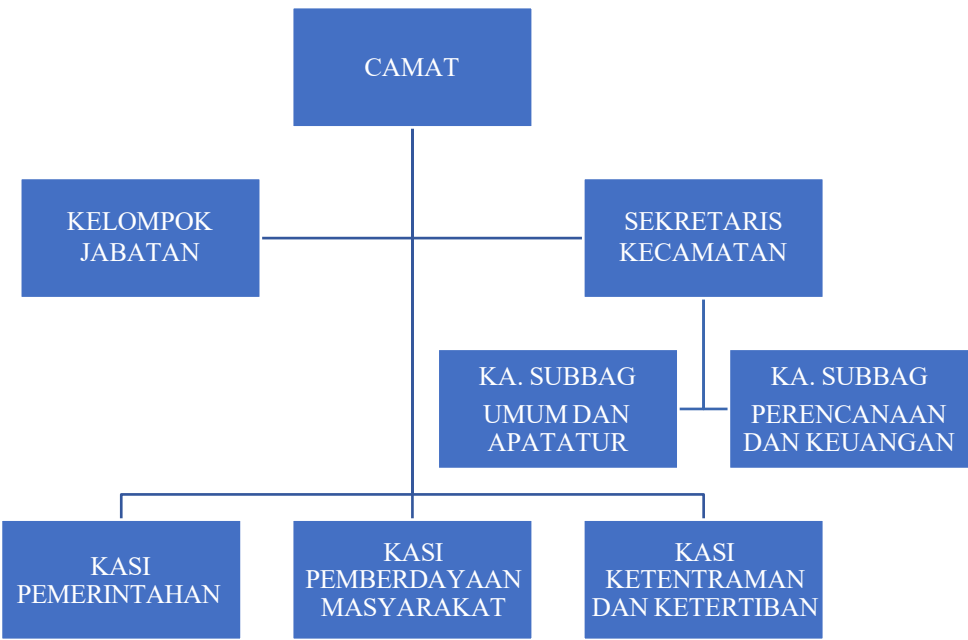
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

Jabatan fungsional tertentu dilingkungan Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta formasi jabatan fungsional tertentu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan telah diatur dalam Peraturan WaliKota Nomor 79 Tahun 2021, adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terdiri dari:

- 1. Camat;
- 2. Sekretaris Kecamatan;
- 3. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- 4. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- 5. Kepala Seksi Pemerintahan;
- 6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

**Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pontianak Timur
Kota Pontianak**



b. Sumber Daya

Sampai akhir Tahun 2025 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi didukung oleh 79 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Dari segi Kepangkatan / Golongan Ruang, terdiri dari:

No.	Golongan	Jumlah
1.	I	0
2.	II	8
3.	III	57
4.	IV	2
5.	PPPK	7
Total Jumlah		74

Dari segi kualifikasi pendidikan formal, terdiri dari:

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	0
2.	SLTP	3
3.	SLTA	18
4.	D3	9
5.	D4	1
6.	S1	36
7.	S2	7
Total Jumlah		74

Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Diklatpim	Jumlah
1.	Diklat Pim III	1
2.	Diklat Pim IV	27
Total Jumlah		28

Dari Segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

No.	Eselon	Jumlah
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	30
Total Jumlah		32

Perkembangan Pegawai Kecamatan Pontianak Timur
Tahun 2020-2025

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tahun 2020	66 orang	Kecamatan Pontianak Timur
2.	Tahun 2021	64 orang	Kecamatan Pontianak Timur
3.	Tahun 2022	63 orang	Kecamatan Pontianak Timur
4.	Tahun 2023	63 orang	Kecamatan Pontianak Timur
5.	Tahun 2024	63 orang	Kecamatan Pontianak Timur
6.	Tahun 2025	74 orang	Kecamatan Pontianak Timur

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pontianak Timur, maka dilengkapi sarana dan prasarana. Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- 1. Gedung kantor Kecamatan Pontianak Timur terdiri dari Kantor Camat dan 7 kantor lurah, sebagai berikut:**
- a) Kantor Camat Pontianak Timur telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan H. Rasuna Said Komplek Perumnas III Kelurahan Tanjung Hulu.
 - b) Kantor Lurah Saigon telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya 2 Kelurahan Saigon.
 - c) Kantor Lurah Tanjung Hulu telah menempati gedung Kantor sendiri yang terletak di Jalan Samanhudi gang Agatis Komplek Perumnas III Kelurahan Tanjung Hulu.
 - d) Kantor Lurah Tanjung Hilir telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Paralel Tol Kelurahan Tanjung Hilir.
 - e) Kantor Lurah Dalam Bugis telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya 1 Kelurahan Dalam Bugis.
 - f) Kantor Lurah Parit Mayor telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya 2 Kelurahan Parit Mayor.
 - g) Kelurahan Banjar Serasan telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan.
 - h) Kelurahan Tambelan Sampit telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya I Gang Pemda Kelurahan Tambelan Sampit.

Daftar Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

No.	Sarana/Prasana	Kecamatan	Kelurahan Saigon	Kelurahan Tanjung Hulu	Kelurahan Tanjung Hilir	Kelurahan Dalam Bugis		Kelurahan Parit Mayor	Kelurahan Banjar Serasan	Kelurahan Tambelan Sampit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)
1	Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit
2	Gedung Serba Guna	1 Unit				-				1 Unit
3	Ruang Kerja Camat/Lurah/Rapat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Uniot	1 Unit	1 Unit
4	Ruang Kerja Sekretaris	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit			1 Unit	1 Unit	1 Unit
5	Ruang Kerja Seksi Pemerintahan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit			1 Unit	1 Unit	1 Unit
6	Ruang Kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1 Unit								
7	Ruang Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1 Unit	-	-	-	-		-	-	-
8	Ruang Kerja Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Unit	-	-	-	-		-	-	-
9	Ruang Kerja Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 Unit	-	-	-	-		-	-	-
10	Ruang Arsip	2 Unit	-	-	-	-		-	-	-
11	Ruang Laktasi	1 Unit	1 Unit	-	-	-		1 Unit	1 Unit	1 Unit
12	Dapur	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit
13	Toilet	3 Unit	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit		4 Unit	1 Unit	1 Unit
14	Tempat Parkir Kendaraan Pegawai	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit

2. Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	Elektric Generating Set	9
2	Pompa	3
3	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1
4	Kendaraan Bermotor Roda Dua	17
5	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	7
6	Kendaraan Bermotor Khusus	1
7	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	1
8	Mesin Ketik	4
9	Mesin Hitung/Mesiin Jumlah	9
10	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	101
11	Alat Kantor Lainnya	39
12	Meubelair	200
13	Alat Pembersih	23
14	Alat Pendingin	114
15	Alat Dapur	11
16	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	158
17	Alat Pemadam Kebakaran	2
18	Meja Kerja Pejabat	102
19	Meja Rapat Pejabat	2
20	Kursi Kerja Pejabat	87
21	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2
22	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7
23	Lemari dan Arsip Pejabat	3
24	Peralatan Studio Audio	26
25	Perakatan Studio Vidio dan Film	1
26	Alat Komunikasi Telephone	3

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
27	Personal Komputer	110
28	Peralatan Mini Komputer	7
29	Peralatan Personal Komputer	137
30	Peralatan Jaringan	8
31	Peralatan Permainan	2

c. Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja menurut indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pada renstra sebelumnya (periode 2015-2019) adalah sebagai berikut:

1) Kinerja Pelayanan di bidang Pemerintahan

Pelayanan Prima di Kecamatan Pontianak Timur mengacu kepada pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Standart Operasioanal Prosedur diatur pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 94 Tahun 2016, meliputi 16 jenis pelayanan di Kecamatan dan 26 jenis pelayanan di kelurahan.

2) Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat atau SKM dilaksanakan pada semester setiap tahunnya, dengan cara menyebarkan kuesioner SKM sebagai tolok ukur penilaian terhadap pelayanan Kecamatan.

Adapun tujuan utama dalam pengukuran survey kepuasan masyarakat adalah untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan. Melalui pengukuran SKM berkala akan diperoleh peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat SKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan Kecamatan Pontianak Timur. Kegiatan ini diarahkan untuk mengukur peningkatan kualitas unsur-unsur pelayanan prima dan dilakukan melalui pengukuran survey kepuasan masyarakat Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terhadap 9 unsur pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan cara menyebarkan kuesioner SKM kepada masyarakat penerima layanan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Tahun Anggaran 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I.	Indeks Infrastruktur Pemukiman terdiri dari Indeks Jalan Lingkungan dan Indeks Drainase	-	-	-	70%	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
II.	Persentase Layanan Administrasi Kecamatan Yang Telah sesuai SOP dan Tepat Waktu	-	-	-	90%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
III.	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kemasyarakatan	-	-	-	80%	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
IV.	Persentase Lembaga dan Kelompok Masyarakat Yang Aktif	-	-	-	70%	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
V.	Persentase Rekomendasi Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti Instansi/Satker Terkait	-	-	-	70%	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-

Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun Anggaran 2021 -2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I.	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	80%	82%	85%	90%	-	80%	82%	85%	90%	-	100%	100%	100%	100%
I.1	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	80%	82%	85%	90%	-	80%	82%	85%	90%	-	100%	100%	100%	100%
II	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	-	-	-	-	75%	80%	82%	85%	-	75%	80%	82%	85%	-	100%	100%	100%	100%
II.1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	-	-	-	-	75%	80%	82%	85%	-	75%	80%	82%	85%	-	100%	100%	100%	100%
III	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-	-	-	-	80%	82%	85%	90%	-	80%	82%	85%	90%	-	100%	100%	100%	100%
III.1	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-	-	-	-	80%	82%	85%	90%	-	80%	82%	85%	90%	-	100%	100%	100%	100%
IV	Persentase Koordinasi Penyelenggaan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	-	80%	82%	85%	90%	-	80%	82%	85%	90%	-	100%	100%	100%	100%
IV.1	Persentase Koordinasi Penyelenggaan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	-	80%	82%	85%	90%	-	80%	82%	85%	90%	-	100%	100%	100%	100%

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	2.467.500.000.	-	-	-	-	2.466.304.888	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	370.295.500	-	-	-	-	349.925.400	-	-	-	-	0,94	-	-	-	-	-	-
3.	Program Pembinaan Lembaga Masyarakat	173.710.000	-	-	-	-	170.444.600	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-	-
4.	Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	140.362.300	-	-	-	-	139.602.100	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
5.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Mayarakat	579.659.900	-	-	-	-	538.929.200	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-	-	-
6.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.424.145.414	-	-	-	-	11.378.522.741	-	-	-	-	0,92	-	-	-	-		
7.	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	601.218.700	-	-	-	-	576.324.940	-	-	-	-	0,96	-	-	-	-		
8.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem	20.327.100	-	-	-	-	20.316.200	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-		
9.	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	46.270.000	-	-	-	-	46.270.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-		
10.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	4.540.000	-	-	-	-	4.535.500	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-		
11.	Program Peningkatan Pelayanan Prima	11.050.000	-	-	-	-	10.858.900	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-		
12.	Program Pengembangan Data/Informasi	24.410.000	-	-	-	-	23.676.900	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-		

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Tahun Anggaran 2021-2024

No.	Uraian***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	55.083.160	93.299.900	831.840.400	880.950.000	-	50.268.160	82.999.900	820.565.800	865.461.300	-	0,91	0,89	0,99	0,98	430,72	65,11
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	472.725.500	1.210.487.700	2.820.931.046	3.054.275.080	-	444.130.800	1.129.414.600	2.706.869.610	2.787.104.200	-	0,94	0,93	0,96	0,91	149,41	154,30
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	-	475.814.350	221.281.000	28.460.000	100.000.000	-	402.870.474	181.759.500	26.520.000	93.054.000	-	0,85	0,82	0,93	0,93	-63,80	-54,88
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	436.466.230	684.000.650	577.086.009	928.044.000	-	416.610.000	660.220.050	565.090.440	798.712.500	-	0,95	0,97	0,86	0,86	25,09	58,47
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	10.663.020.165	10.592.047.590	11.044.221.136	12.457.441.209	-	10.430.973.620	10.386.256.846	10.832.667.800	11.873.591.099	-	0,98	0,98	0,98	0,95	-0,10	-0,43

d. Kelompok Sasaran Layanan

Sasaran Layanan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yaitu Masyarakat, untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat di Lingkungan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak khususnya, perlunya peningkatan kinerja:

- 1) Bidang Pemerintahan
- 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 3) Bidang Ketentraman dan ketertiban

Adapun mitra perangkat daerah yang telah atau sedang memiliki kejasama dengan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, yaitu:

- 1) Tokoh Masyarakat khususnya pada Rukun Warga dan Rukun Masyarakat.
- 2) Melibatkan kader masyarakat seperti Karang Taruna, Forum Anak, Kader PKK.
- 3) Dukungan lintas sektor di Kota Pontianak
 - a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak terhadap layanan kependudukan kepada seluruh penduduk Kota Pontianak pada umumnya dan Kecamatan Pontianak Timur khususnya.
 - b) Dinas Sosial Kota Pontianak terhadap zonasi pendataan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), data penerima bantuan sosial dan layanan BPJS-PBI.
 - c) DP2KBP3A Kota Pontianak terkait pelaksanaan kampung KB dan kegiatan Forum Anak.
 - d) Dinas pendidikan terkait penyusunan database dan profil kecamatan.
 - e) KUA Kecamatan Pontianak Timur terhadap pemberian dispensasi nikah.
 - f) KPU Kota Pontianak terkait dengan kegiatan pemilu.
 - g) Polsek dan Koramil dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Pontianak Timur.

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a) Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak meliputi:

- 1) Kondisi geografis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang rawan akan bencana alam, misal air pasang/rob, angin puting beliung dan lain-lain.
- 2) Kondisi bangunan Kantor dan ruang pelayanan yang kurang memadai.
- 3) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum

memenuhi harapan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

- 4) Masih kurangnya Koordinasi yang baik dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku.
- 5) Keberagaman penduduk di Kecamatan Pontianak Timur baik dari agama, etnis, dan tingkat ekonomi sehingga harus dikelola dengan baik agar tidak muncul konflik sosial.
- 6) Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

b) Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, meliputi:

- 1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, pengembangan teknologi informasi dan melakukan inovasi pelayanan.
- 2) Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan saat ini terus semakin tumbuh.
- 3) Sudah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Pontianak Tahun 2013-2033 sebagai acuan/pedoman dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
- 4) Adanya koordinasi yang baik dalam melaksanakan peraturan hukum dengan tepat dan benar.
- 5) Adanya peningkatan SDM yang baik lewat pelatihan, workshop dan pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan prima.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan Pelayanan

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak diambil berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam mewujudkan layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas dan mewujudkan masyarakat yang berdaya, seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelayanan Publik	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	1. Belum optimalnya penerapan SOP dan SP 2. Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar 3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik 4. Kurangnya jumlah aparatur yang memiliki kapabilitas, kapasitas dan kompetensi.
2.	Pemberdayaan Masyarakat	Perlunya peningkatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Belum optimalnnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan 2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat 3. Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait kelembagaan masyarakat
3.	Ketentraman dan Ketertiban	Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan 2. Masih kurangnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertibanlingkungan 3. Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang belum optimal
4.	Insprastruktur dan Lingkungan	Belum optimalnya pembangunan insprastruktur dan lingkungan	1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan perlu ditingkatkan 2. Kondisi sarana dan prasarana lingkungan perlu perbaikan dan peningkatan 3. Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat perlu ditingkatkan.

b) Penentuan Isu-isu Strategis

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas perwujudan suatu strategi dari suatu rencana induk yang komprehensif yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kebijakan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Pontianak Timur
Kota Pontianak

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU STRATEGIS			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	-	-	Penguatan manajemen talenta ASN diseluruh instansi Pemerintah melalui pembangunan talent pool di seluruh K/L/D dengan pemb sistem informasi manajemen talenta dan satu data manajemen talenta, penuntasan asesmen kompetensi, penguatan manajemen kinerja, dan pengembangan kompetensi ASN, perbaikan kebijakan penghargaan bagi ASN	-	Peningkatan kualitas pelayanan, perlu mereformasi kemampuan institusi dalam memehuni pelayanan publik.
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	- Perlunya peningkatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Belum optimalnya pembangunan insprastruktur dan lingkungan -	-	Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 9 SDG's: Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Belum optimalnya konektivitas, menyebabkan rendahnya kinerja logistik dan daya saing global dibandingkan dengan negara-negara di Asia-Pasifik	Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU STRA			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban	Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	-	Menguatkan masy yang inklusif dan damai utk pemb berkelanjutan, akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Regulasi yang berlebih (hyper regulation) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundangundangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan kesadaran dan kepatuhan serta peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Belum terciptanya pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien	-	Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB nomor 16 terkait Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dan TPB 17 terkait Kemitraan untuk mencapai tujuan;	-	Perangkat Daerah yang lincah dan dinamis	Peningkatan Insfrastruktur jalan, drainase dan fasilitas umum di Kecamatan Pontianak Timur dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Penentuan tujuan dan sasaran Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Penentuan tujuan dan sasaran Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak

3.1. Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pontianak dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Rencana Strategis ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur”, Tujuan tersebut selaras dengan Misi 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025- 2029, yaitu: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur

Kota Pontianak, dalam hal ini Kecamatan Kota Pontianak diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kota Pontianak dapat tercapai.

3.2. Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025-2029

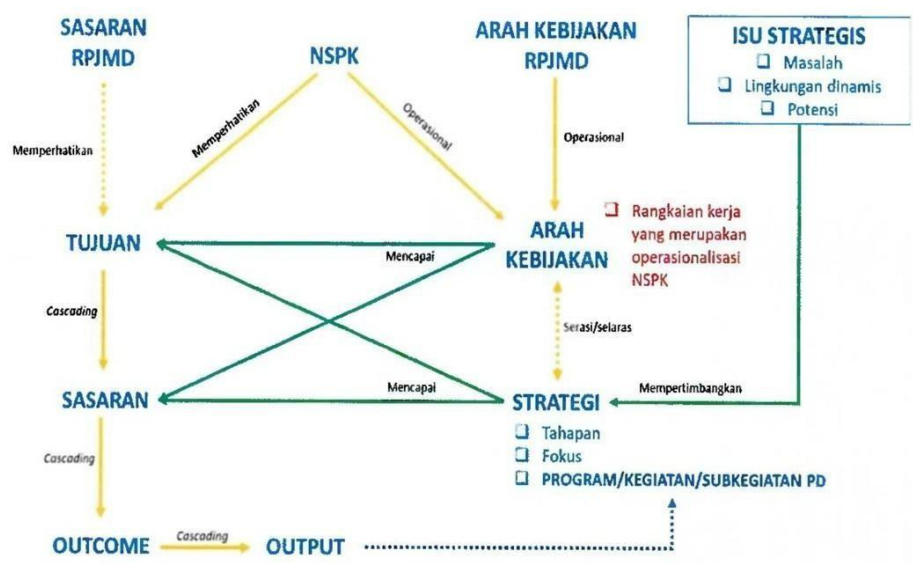
Sasaran strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak ditentukan berdasarkan permasalahan pokok dan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan merujuk tujuan tersebut.

Sasaran dalam Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

- 1) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur
- 2) Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak tahun 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

**Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Pontianak Timur
Kota Pontianak**



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah 5 (lima) tahun yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya:

1. Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.
3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.
4. Program Prioritas.

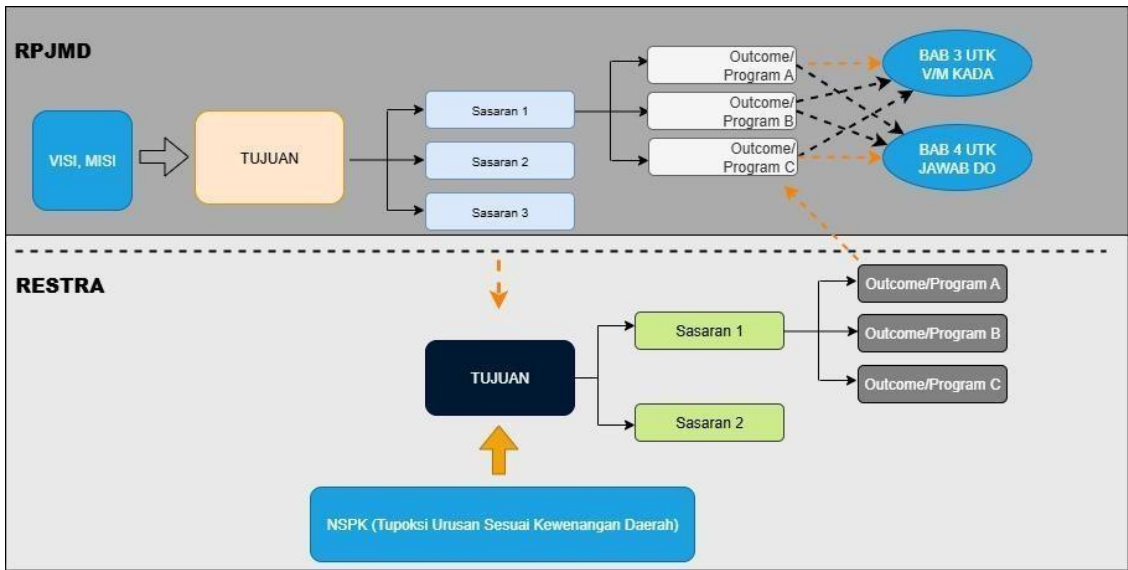
Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kota Pontianak.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah.
3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan.
4. Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:

**Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak**



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan/Sub. Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan Teknik Logical Framework (Logframe).
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan.
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional.
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap.

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalisme dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra
Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TIMUR											
- Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Pontianak Timur (Indeks)	-	3,6	3,65	3,7	3,75	3,8	3,85	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur (Nilai)	85	88	90	91	92	93	94	
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Timur (Nilai)	94,15	94,56	94,66	94,76	94,86	94,96	95,06	

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi. Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah.

Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

3.3. Strategi Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 memuat penetapan tujuan dan sasaran strategis Kota Pontianak untuk 5 (tahun) tahun kedepan. Dalam hal mempercepat pencapaian sasaran yang tertuang pada RPJMD Kota Pontianak 2025-2029, maka perlunya penetapan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pontianak Timur Kota

Pontianak yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan setiap program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, Tugas pokok dan fungsi kecamatan antara lain:

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang tertuang diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pontianak Timur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak	1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak	1. Meningkatkan Lembaga/Masyarakat yang Aktif	1. Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan 2. Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif
	2. Meningkatkan Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak	1. Meningkatkan Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	1. Melaksanakan Koordinasi Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan
		2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Publik yang Dilimpahkan di Kecamatan

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi

ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kota Pontianak, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kota Pontianak. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kota Pontianak secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak:

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antar perangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Penahapan Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur
Kota Pontianak**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Melatih Petugas Pelayanan Publik agar Lebih Ramah, Cepat dan Tepat Dalam Melayani Masyarakat	Pemanfaatan Teknologi Digital Agar Layanan Publik Lebih Cepat Dan Efesien	Pelatihan Keterampilan dan Optimalisasi Organisasi	Peningkatan Kualitas Pelayan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Berkelanjutan dan Berdampak Baik untuk Kemajuan

3.4. Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan fperumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak**

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Penyederhanaan regulasi, dan pembangunan infrastruktur teknologi informasi untuk tata kelola pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana merit system	Menciptakan Pemerintahan yang modern, efisien, transparan, dan berbasis kinerja	
2.		Harmonisasni regulasi, penerapan prinsip good governace dan pengembangan interoperabilitas data dan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik, penguatan kompetensi ASN untuk penerapan merit system	Penyelarasan Aturan, Pembangunan Sistem Yang Terintegrasi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pelatihan	
3.		Peningkatan kualitas regulasi, pemanfaatan Internet of Things (IOT), Artificial Intelligence, dan Big Data Analytics dalam penerapan Good Governance	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Yang Lebih Transparan, efisien dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat.	
4.		Pemantapan Good Governance	memperkuat dan menyempurnakan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	
5.		Memperluas pemanfaatan Internet of Things (IOT), Artificial Intelligence, dan Big Data Analitycs dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Menciptakan tata kelola yang lebih modern, efisien, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Pontianak Timur guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 – 2029 meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan)
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan dan 7 Kelurahan)

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (7 Kelurahan)
 - 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (7 Kelurahan)
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (7 Kelurahan)
 - 4) Evaluasi Kelurahan (Kecamatan)
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
 - 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan)

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan)
 - 2) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keagamaan Lokal, Regional dan Nasional (Kecamatan dan 7 Kelurahan)

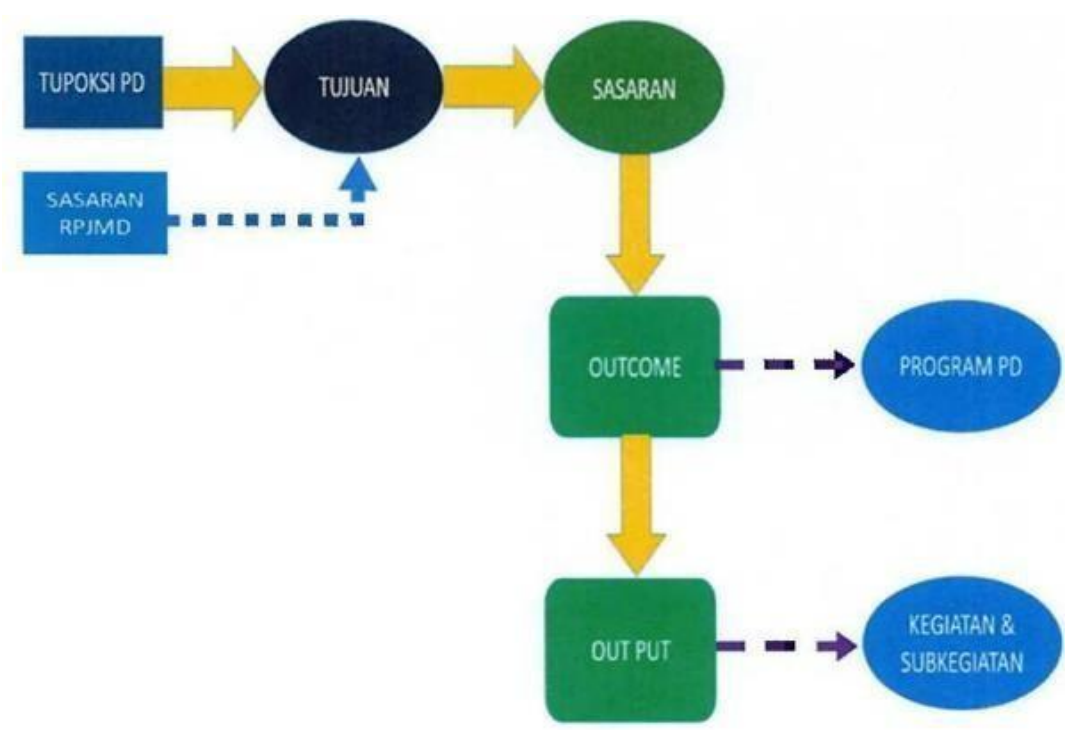
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan)
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan)
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Kecamatan)
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan)
 - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan)
 - 6) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah (Kecamatan)
 - 7) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah (Kecamatan)
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan)
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Kecamatan)
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan)
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan)
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Kecamatan)
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kecamatan)
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan)
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Kecamatan)
 - 3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Kecamatan)
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan)
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan)
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan)

- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan dan 7 Kelurahan)
- 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan dan 7 Kelurahan)
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan)
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan)
- 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan)
- 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Kecamatan)
- f. Adminitrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan)
 - 2) Pengadaan Mebel (Kecamatan)
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan)
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan)
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan)
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan)
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan dan Kelurahan)
 - 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan)

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dijelaskan pada Gambar 4.1 dibawah ini:

**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan
Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak**



Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dijabarkan pada Tabel 4.1 dibawah ini:

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					21.289.376.885		21.620.959.682		22.092.900.998		22.624.941.637		23.158.598.424	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.184.385.985		13.198.061.782		13.318.113.098		13.636.953.737		13.677.610.524	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	100	13.184.385.985	100	13.198.061.782	100	13.318.113.098	100	13.636.953.737	100	13.677.610.524	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					115.900.000		120.900.000		229.640.000		239.640.000		254.640.000	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	92	95	115.900.000	96	120.900.000	97	229.640.000	98	239.640.000	99	254.640.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	92	95		96		97		98		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	92	95		96		97		98		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	92	95		96		97		98		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	92	95		96		97		98		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	92	95		96		97		98		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	92	95		96		97		98		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	92	95		96		97		98		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					6.694.090.900		6.896.997.900		7.090.147.900		7.176.347.900		7.501.347.900	
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	88	90	6.694.090.900	91	6.896.997.900	92	7.090.147.900	93	7.176.347.900	94	7.501.347.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	88	90		91		92		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	88	90		91		92		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	88	90		91		92		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	88	90		91		92		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	88	90		91		92		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	88	90		91		92		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	88	90		91		92		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					150.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000	
Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	90	92	95	150.000.000	96	200.000.000	97	200.000.000	98	250.000.000	99	250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.145.000.000		1.205.000.000		1.255.000.000		1.322.000.000		1.475.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	92	95	1.145.000.000	96	1.205.000.000	97	1.255.000.000	98	1.322.000.000	99	1.475.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	92	95		96		97		98		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	92	95		96		97		98		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	92	95		96		97		98		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	92	95		96		97		98		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	92	95		96		97		98		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	92	95		96		97		98		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	92	95		96		97		98		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	92	95		96		97		98		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					21289376885.00		21620959682.00		22092900998.00		22624941637.00		23158598424.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TIMUR							
- Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Pontianak Timur (Indeks)		
					Indeks Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur (Nilai)		
					Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur	Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Timur		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Timur (Nilai)		
					Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	
				Terkelolanya barang milik daerah dengan baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN SAIGON							
- Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur	Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.05.0002 - KELURAHAN TANJUNG HULU							
- Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur	Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Timur	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
7.01.0.00.0.00.05.0003 - KELURAHAN TANJUNG HILIR							
- Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
	Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur	Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	

7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN DALAM BUGIS

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur	Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.05.0005 - KELURAHAN PARITMAYOR							
- Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur	Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Timur		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.05.0006 - KELURAHAN BANJAR SERASAN							
- Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur	Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN TAMBELANSAMPIT							
- Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur	Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Timur	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada Tabel 4.3 dibawah ini:

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				21.289.376.885		21.620.959.682		22.092.900.998		22.624.941.637		23.158.598.424		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.184.385.985		13.198.061.782		13.318.113.098		13.636.953.737		13.677.610.524		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	100	13.184.385.985	100	13.198.061.782	100	13.318.113.098	100	13.636.953.737	100	13.677.610.524	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26.590.000		66.590.000		26.590.000		26.590.000		26.590.000		
Terlaksananya perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	26.590.000	1	66.590.000	1	26.590.000	1	26.590.000	1	26.590.000		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	13		13		13		13		13			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	2		2		2		2		2			2
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.900.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	2	3.900.000	2	3.900.000	2	3.900.000	2	3.900.000	2	3.900.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.850.000		4.850.000		4.850.000		4.850.000		4.850.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.850.000	1	4.850.000	1	4.850.000	1	4.850.000	1	4.850.000		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.850.000		4.850.000		4.850.000		4.850.000		4.850.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.850.000	1	4.850.000	1	4.850.000	1	4.850.000	1	4.850.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	6	5.700.000	6	5.700.000	6	5.700.000	6	5.700.000	6	5.700.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.290.000		2.290.000		2.290.000		2.290.000		2.290.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2	2.290.000	2	2.290.000	2	2.290.000	2	2.290.000	2	2.290.000		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	13	2.500.000	13	2.500.000	13	2.500.000	13	2.500.000	13	2.500.000		
7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		40.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.643.547.985		10.498.272.107		10.453.089.107		10.429.221.107		10.365.276.107		
Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	5	10.643.547.985	5	10.498.272.107	5	10.453.089.107	5	10.429.221.107	5	10.365.276.107		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	63	79		79		79		79		79			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	48		48		48		48		48			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.982.407.985		9.847.504.907		9.802.321.907		9.778.453.907		9.714.508.907		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	63	79	9.982.407.985	79	9.847.504.907	79	9.802.321.907	79	9.778.453.907	79	9.714.508.907		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				648.840.000		638.400.000		638.400.000		638.400.000		638.400.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	648.840.000	12	638.400.000	12	638.400.000	12	638.400.000	12	638.400.000		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	5	1.200.000	5	1.200.000	5	1.200.000	5	1.200.000	5	1.200.000		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				11.100.000		11.167.200		11.167.200		11.167.200		11.167.200		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	48	11.100.000	48	11.167.200	48	11.167.200	48	11.167.200	48	11.167.200		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				30.700.000		30.700.000		31.950.000		31.950.000		31.950.000		
Terkelolanya barang milik daerah dengan baik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	30.700.000	1	30.700.000	1	31.950.000	1	31.950.000	1	31.950.000		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	10		10		10		10		10			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.500.000		2.500.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	3.750.000	1	3.750.000	1	3.750.000		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				28.200.000		28.200.000		28.200.000		28.200.000		28.200.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	10	28.200.000	10	28.200.000	10	28.200.000	10	28.200.000	10	28.200.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				142.130.000		142.130.000		161.180.000		217.180.000		217.180.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	4	142.130.000	4	142.130.000	4	161.180.000	4	217.180.000	4	217.180.000		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	18		18		18		18					
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	4		4		4		4					
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				131.330.000		131.330.000		150.380.000		206.380.000		206.380.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	4	131.330.000	4	131.330.000	4	150.380.000	4	206.380.000	4	206.380.000		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	18	5.600.000	18	5.600.000	18	5.600.000	18	5.600.000	18	5.600.000		
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.200.000		5.200.000		5.200.000		5.200.000		5.200.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	4	5.200.000	4	5.200.000	4	5.200.000	4	5.200.000	4	5.200.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				562.948.000		615.611.200		683.948.000		751.840.000		787.840.000		
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	4	562.948.000	1	615.611.200	1	683.948.000	1	751.840.000	1	787.840.000		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	96	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		40.000.000		40.000.000		60.000.000		60.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	4	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				240.000.000		218.472.450		230.000.000		240.000.000		250.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	4	240.000.000	4	218.472.450	4	230.000.000	4	240.000.000	4	250.000.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				60.000.000		91.527.550		130.000.000		150.000.000		170.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8	4	60.000.000	4	91.527.550	4	130.000.000	4	150.000.000	4	170.000.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				39.000.000		66.663.200		80.000.000		85.000.000		90.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	39.000.000	12	66.663.200	12	80.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		25.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	25.000.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				13.440.000		13.440.000		13.440.000		13.440.000		13.440.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	96	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000		65.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	2	60.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				27.108.000		27.108.000		27.108.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2	27.108.000	2	27.108.000	2	27.108.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				69.400.000		69.400.000		69.400.000		69.400.000		69.400.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12	69.400.000	12	69.400.000	12	69.400.000	12	69.400.000	12	69.400.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.000.000		220.000.000		232.500.000		292.839.000		310.000.000		
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	16	200.000.000	65	220.000.000	65	232.500.000	65	292.839.000	65	310.000.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	27	16		16		16		16					
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0					
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		40.000.000		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000		80.000.000		120.000.000		142.839.000		150.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	16	50.000.000	65	80.000.000	65	120.000.000	65	142.839.000	65	150.000.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		100.000.000		112.500.000		150.000.000		160.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	27	16	150.000.000	16	100.000.000	16	112.500.000	16	150.000.000	16	160.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.063.330.000		1.145.893.755		1.145.907.991		1.171.385.630		1.169.826.417		
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.063.330.000	12	1.145.893.755	12	1.145.907.991	12	1.171.385.630	12	1.169.826.417		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12				12		12					
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				236.894.880		245.893.755		245.907.991		271.385.630		269.826.417		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	236.894.880	12	245.893.755	12	245.907.991	12	271.385.630	12	269.826.417		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				826.435.120		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	826.435.120	12	900.000.000	12	900.000.000	12	900.000.000	12	900.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				343.220.000		293.364.720		386.948.000		491.948.000		516.948.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24	24	343.220.000	24	293.364.720	24	386.948.000	24	491.948.000	24	516.948.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18	18		18		18		18		18			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				151.220.000		138.193.000		156.948.000		156.948.000		156.948.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18	18	151.220.000	18	138.193.000	18	156.948.000	18	156.948.000	18	156.948.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24	24	30.000.000	24	30.000.000	24	30.000.000	24	35.000.000	24	35.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				162.000.000		125.171.720		200.000.000		300.000.000		325.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	162.000.000	2	125.171.720	2	200.000.000	2	300.000.000	2	325.000.000	7.01.0.00.0.00.05.00 01 - KELURAHAN SAIGON	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	100	13.184.385.985	100	13.198.061.782	100	13.318.113.098	100	13.636.953.737	100	13.677.610.524		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.500.000		21.500.000		23.000.000		26.000.000		30.000.000		
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	20.500.000	12	21.500.000	12	23.000.000	12	26.000.000	12	30.000.000		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12				12		12		12			
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.500.000		14.000.000		15.000.000		17.000.000		20.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	13.500.000	12	14.000.000	12	15.000.000	12	17.000.000	12	20.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		7.500.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	7.000.000	12	7.500.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.060.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	4.060.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.060.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	4.060.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	100	13.184.385.985	100	13.198.061.782	100	13.318.113.098	100	13.636.953.737	100	13.677.610.524	7.01.0.00.0.00.05.00 02 - KELURAHAN TANJUNG HULU	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.500.000		21.500.000		23.000.000		26.000.000		30.000.000		
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	20.500.000	12	21.500.000	12	23.000.000	12	26.000.000	12	30.000.000		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12				12		12		12			
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.500.000		14.000.000		15.000.000		17.000.000		20.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	13.500.000	12	14.000.000	12	15.000.000	12	17.000.000	12	20.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		7.500.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	7.000.000	12	7.500.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.060.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	4.060.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.060.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000	7.01.0.00.0.00.05.00 03- KELURAHAN TANJUNG HILIR	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	4.060.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	100	13.184.385.985	100	13.198.061.782	100	13.318.113.098	100	13.636.953.737	100	13.677.610.524		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.500.000		21.500.000		23.000.000		26.000.000		30.000.000		
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	20.500.000	12	21.500.000	12	23.000.000	12	26.000.000	12	30.000.000		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12				12		12					
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.500.000		14.000.000		15.000.000		17.000.000		20.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	13.500.000	12	14.000.000	12	15.000.000	12	17.000.000	12	20.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		7.500.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	7.000.000	12	7.500.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.060.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	4.060.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.060.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	4.060.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	100	13.184.385.985	100	13.198.061.782	100	13.318.113.098	100	13.636.953.737	100	13.677.610.524	7.01.0.00.0.00.05.00 04- KELURAHAN DALAM BUGIS	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.500.000		21.500.000		23.000.000		26.000.000		30.000.000		
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	20.500.000	12	21.500.000	12	23.000.000	12	26.000.000	12	30.000.000		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12				12		12					
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.500.000		14.000.000		15.000.000		17.000.000		20.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	13.500.000	12	14.000.000	12	15.000.000	12	17.000.000	12	20.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		7.500.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	7.000.000	12	7.500.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.060.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	4.060.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.060.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	4.060.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000	7.01.0.00.0.00.05.00 05 - KELURAHAN PARITMAYOR	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	100	13.184.385.985	100	13.198.061.782	100	13.318.113.098	100	13.636.953.737	100	13.677.610.524		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.500.000		21.500.000		23.000.000		26.000.000		30.000.000		
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	20.500.000	12	21.500.000	12	23.000.000	12	26.000.000	12	30.000.000		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12				12				12			
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.500.000		14.000.000		15.000.000		17.000.000		20.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	13.500.000	12	14.000.000	12	15.000.000	12	17.000.000	12	20.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		7.500.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	7.000.000	12	7.500.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.060.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	4.060.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.060.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	4.060.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	100	13.184.385.985	100	13.198.061.782	100	13.318.113.098	100	13.636.953.737	100	13.677.610.524	7.01.0.00.0.00.05.00 06 - KELURAHAN BANJAR SERASAN	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.500.000		21.500.000		23.000.000		26.000.000		30.000.000		
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	20.500.000	12	21.500.000	12	23.000.000	12	26.000.000	12	30.000.000		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12				12				12			
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.500.000		14.000.000		15.000.000		17.000.000		20.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	13.500.000	12	14.000.000	12	15.000.000	12	17.000.000	12	20.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		7.500.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	7.000.000	12	7.500.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.060.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	4.060.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.060.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	4.060.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	100	13.184.385.985	100	13.198.061.782	100	13.318.113.098	100	13.636.953.737	100	13.677.610.524	7.01.0.00.0.00.05.00 07 - KELURAHAN TAMBELANSAMPIT	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.500.000		21.500.000		23.000.000		26.000.000		30.000.000		
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	20.500.000	12	21.500.000	12	23.000.000	12	26.000.000	12	30.000.000		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12				12		12		12			
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.500.000		14.000.000		15.000.000		17.000.000		20.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	13.500.000	12	14.000.000	12	15.000.000	12	17.000.000	12	20.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		7.500.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	7.000.000	12	7.500.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.060.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	4.060.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.060.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	4.060.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				115.900.000		120.900.000		229.640.000		239.640.000		254.640.000		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	95	115.900.000	96	120.900.000	97	229.640.000	98	239.640.000	99	254.640.000	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				85.000.000		107.575.800		146.687.500		146.687.500		161.687.500		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	3	1	85.000.000	1	107.575.800	1	146.687.500	1	146.687.500	1	161.687.500		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				85.000.000		107.575.800		146.687.500		146.687.500		161.687.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	3	1	85.000.000	1	107.575.800	1	146.687.500	1	146.687.500	1	161.687.500				
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				8.500.000		1.754.600		22.701.900		32.701.900		32.701.900				
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	2	8.500.000	2	1.754.600	2	22.701.900	2	32.701.900	2	32.701.900				
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8.500.000		1.754.600		22.701.900		32.701.900		32.701.900				
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	2	8.500.000	2	1.754.600	2	22.701.900	2	32.701.900	2	32.701.900	7.01.0.00.0.00.05.00 01 - KELURAHAN SAIGON			
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	95	115.900.000	96	120.900.000	97	229.640.000	98	239.640.000	99	254.640.000				
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				3.200.000		1.652.800		9.521.900		9.521.900		9.521.900				
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	3.200.000	2	1.652.800	2	9.521.900	2	9.521.900	2	9.521.900				
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3.200.000		1.652.800		9.521.900		9.521.900		9.521.900	7.01.0.00.0.00.05.00 02 - KELURAHAN TANJUNG HULU			
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	3.200.000	2	1.652.800	2	9.521.900	2	9.521.900	2	9.521.900				
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	95	115.900.000	96	120.900.000	97	229.640.000	98	239.640.000	99	254.640.000				
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				3.200.000		1.652.800		9.521.900		9.521.900		9.521.900				
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	3.200.000	2	1.652.800	2	9.521.900	2	9.521.900	2	9.521.900				
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3.200.000		1.652.800		9.521.900		9.521.900		9.521.900				
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	3.200.000	2	1.652.800	2	9.521.900	2	9.521.900	2	9.521.900				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	95	115.900.000	96	120.900.000	97	229.640.000	98	239.640.000	99	254.640.000	7.01.0.00.0.00.05.00 03 - KELURAHAN TANJUNG HILIR	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				3.200.000		1.652.800		8.241.900		8.241.900		8.241.900		
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	3.200.000	2	1.652.800	2	8.241.900	2	8.241.900	2	8.241.900		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3.200.000		1.652.800		8.241.900		8.241.900		8.241.900		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	3.200.000	2	1.652.800	2	8.241.900	2	8.241.900	2	8.241.900		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	95	115.900.000	96	120.900.000	97	229.640.000	98	239.640.000	99	254.640.000	7.01.0.00.0.00.05.00 04 - KELURAHAN DALAM BUGIS	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				3.200.000		1.652.800		9.201.900		9.201.900		9.201.900		
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	3.200.000	2	1.652.800	2	9.201.900	2	9.201.900	2	9.201.900		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3.200.000		1.652.800		9.201.900		9.201.900		9.201.900		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	3.200.000	2	1.652.800	2	9.201.900	2	9.201.900	2	9.201.900		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	95	115.900.000	96	120.900.000	97	229.640.000	98	239.640.000	99	254.640.000	7.01.0.00.0.00.05.00 05 - KELURAHAN PARITMAYOR	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				3.200.000		1.652.800		7.921.000		7.921.000		7.921.000		
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	3.200.000	2	1.652.800	2	7.921.000	2	7.921.000	2	7.921.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3.200.000		1.652.800		7.921.000		7.921.000		7.921.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	3.200.000	2	1.652.800	2	7.921.000	2	7.921.000	2	7.921.000		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	95	115.900.000	96	120.900.000	97	229.640.000	98	239.640.000	99	254.640.000	7.01.0.00.0.00.05.00 06 - KELURAHAN BANJAR SERASAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				3.200.000		1.652.800		7.921.000		7.921.000		7.921.000		
Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	3.200.000	2	1.652.800	2	7.921.000	2	7.921.000	2	7.921.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3.200.000		1.652.800		7.921.000		7.921.000		7.921.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	3.200.000	2	1.652.800	2	7.921.000	2	7.921.000	2	7.921.000	7.01.0.00.0.00.05.00 07 - KELURAHAN TAMBELANSAMPIT	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	95	115.900.000	96	120.900.000	97	229.640.000	98	239.640.000	99	254.640.000		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				3.200.000		1.652.800		7.921.000		7.921.000		7.921.000		
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	3.200.000	2	1.652.800	2	7.921.000	2	7.921.000	2	7.921.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3.200.000		1.652.800		7.921.000		7.921.000		7.921.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	3.200.000	2	1.652.800	2	7.921.000	2	7.921.000	2	7.921.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				6.694.090.900		6.896.997.900		7.090.147.900		7.176.347.900		7.501.347.900	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	90	6.694.090.900	91	6.896.997.900	92	7.090.147.900	93	7.176.347.900	94	7.501.347.900		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				345.800.000		350.000.000		380.960.000		422.160.000		480.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	27	27	345.800.000	38	350.000.000	38	380.960.000	38	422.160.000	38	480.000.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				345.800.000		350.000.000		380.960.000		422.160.000		480.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	27	27	345.800.000	38	350.000.000	38	380.960.000	38	422.160.000	38	480.000.000		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				150.000.000		149.810.000		172.000.000		182.000.000		205.160.000		
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	3	3	150.000.000	3	149.810.000	3	172.000.000	3	182.000.000	3	205.160.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				150.000.000		149.810.000		172.000.000		182.000.000		205.160.000	7.01.0.00.0.00.05.00 01 -KELURAHAN SAIGON	
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	3	3	150.000.000	3	149.810.000	3	172.000.000	3	182.000.000	3	205.160.000		
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	90	6.694.090.900	91	6.896.997.900	92	7.090.147.900	93	7.176.347.900	94	7.501.347.900		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.245.979.070		1.274.410.070		1.294.410.070		1.299.410.070		1.321.410.070		
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	1.245.979.070	7	1.274.410.070	7	1.294.410.070	7	1.299.410.070	7	1.321.410.070		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5				5		5					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2				2		2		2			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				32.769.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	32.769.000	7	40.000.000	7	45.000.000	7	50.000.000	7	55.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				232.899.070		232.899.070		232.899.070		232.899.070		232.899.070		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2	232.899.070	2	232.899.070	2	232.899.070	2	232.899.070	2	232.899.070		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				980.311.000		1.001.511.000		1.016.511.000		1.016.511.000		1.033.511.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	980.311.000	5	1.001.511.000	5	1.016.511.000	5	1.016.511.000	5	1.033.511.000		
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	90	6.694.090.900	91	6.896.997.900	92	7.090.147.900	93	7.176.347.900	94	7.501.347.900	7.01.0.00.0.00.05.00 02 -KELURAHAN TANJUNG HULU	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.159.745.863		1.188.176.863		1.208.176.863		1.213.176.863		1.253.176.863		
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	1.159.745.863	7	1.188.176.863	7	1.208.176.863	7	1.213.176.863	7	1.253.176.863		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5				5		5					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2				2		2		2			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				32.769.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	32.769.000	7	40.000.000	7	45.000.000	7	50.000.000	7	55.000.000	7.01.0.00.0.00.05.00 03 - KELURAHAN TANJUNG HILIR	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				168.633.863		168.633.863		168.633.863		168.633.863		168.633.863		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2	168.633.863	2	168.633.863	2	168.633.863	2	168.633.863	2	168.633.863		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				958.343.000		979.543.000		994.543.000		994.543.000		1.029.543.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	958.343.000	5	979.543.000	5	994.543.000	5	994.543.000	5	1.029.543.000		
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	90	6.694.090.900	91	6.896.997.900	92	7.090.147.900	93	7.176.347.900	94	7.501.347.900		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				704.100.067		732.531.067		752.531.067		757.531.067		797.531.067		
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	704.100.067	7	732.531.067	7	752.531.067	7	757.531.067	7	797.531.067		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5		5		5		5		5			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				32.769.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	32.769.000	7	40.000.000	7	45.000.000	7	50.000.000	7	55.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				99.249.067		99.249.067		99.249.067		99.249.067		99.249.067		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2	99.249.067	2	99.249.067	2	99.249.067	2	99.249.067	2	99.249.067		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				572.082.000		593.282.000		608.282.000		608.282.000		643.282.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	572.082.000	5	593.282.000	5	608.282.000	5	608.282.000	5	643.282.000		
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	90	6.694.090.900	91	6.896.997.900	92	7.090.147.900	93	7.176.347.900	94	7.501.347.900	7.01.0.00.0.00.05.00 04 - KELURAHAN DALAM BUGIS	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.081.904.084		1.110.335.084		1.130.335.084		1.135.335.084		1.157.335.084		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	1.081.904.084	7	1.110.335.084	7	1.130.335.084	7	1.135.335.084	7	1.157.335.084		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5		5		5		5		5			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				32.769.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	32.769.000	7	40.000.000	7	45.000.000	7	50.000.000	7	55.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				159.552.084		159.552.084		159.552.084		159.552.084		159.552.084		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2	159.552.084	2	159.552.084	2	159.552.084	2	159.552.084	2	159.552.084		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				889.583.000		910.783.000		925.783.000		925.783.000		942.783.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	889.583.000	5	910.783.000	5	925.783.000	5	925.783.000	5	942.783.000		
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	90	6.694.090.900	91	6.896.997.900	92	7.090.147.900	93	7.176.347.900	94	7.501.347.900	7.01.0.00.0.00.05.00 05 - KELURAHAN PARITMAYOR	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				672.476.631		700.847.631		720.847.631		725.847.631		765.847.631		
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	672.476.631	7	700.847.631	7	720.847.631	7	725.847.631	7	765.847.631		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5		5		5		5		5			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				32.769.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	32.769.000	7	40.000.000	7	45.000.000	7	50.000.000	7	55.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				98.260.631		98.260.631		98.260.631		98.260.631		98.260.631		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2	98.260.631	2	98.260.631	2	98.260.631	2	98.260.631	2	98.260.631		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				541.447.000		562.587.000		577.587.000		577.587.000		612.587.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	541.447.000	5	562.587.000	5	577.587.000	5	577.587.000	5	612.587.000		
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	90	6.694.090.900	91	6.896.997.900	92	7.090.147.900	93	7.176.347.900	94	7.501.347.900	7.01.0.00.0.00.05.00 06 - KELURAHAN BANJAR SERASAN	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				754.571.101		783.002.101		803.002.101		808.002.101		848.002.101		
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	754.571.101	7	783.002.101	7	803.002.101	7	808.002.101	7	848.002.101		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5				5		5					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2				2		2		2			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				32.769.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	32.769.000	7	40.000.000	7	45.000.000	7	50.000.000	7	55.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				112.690.101		112.690.101		112.690.101		112.690.101		112.690.101		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2	112.690.101	2	112.690.101	2	112.690.101	2	112.690.101	2	112.690.101		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				609.112.000		630.312.000		645.312.000		645.312.000		680.312.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	609.112.000	5	630.312.000	5	645.312.000	5	645.312.000	5	680.312.000		
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	90	6.694.090.900	91	6.896.997.900	92	7.090.147.900	93	7.176.347.900	94	7.501.347.900	7.01.0.00.0.00.05.00 07 - KELURAHAN TAMBELANSAMPIT	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				579.514.084		607.885.084		627.885.084		632.885.084		672.885.084		
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	579.514.084	7	607.885.084	7	627.885.084	7	632.885.084	7	672.885.084		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5				5		5		5			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2				2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				32.769.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	32.769.000	7	40.000.000	7	45.000.000	7	50.000.000	7	55.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				65.752.084		65.752.084		65.752.084		65.752.084		65.752.084		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2	65.752.084	2	65.752.084	2	65.752.084	2	65.752.084	2	65.752.084		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				480.993.000		502.133.000		517.133.000		517.133.000		552.133.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	480.993.000	5	502.133.000	5	517.133.000	5	517.133.000	5	552.133.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				150.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		
Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	90	95	150.000.000	96	200.000.000	97	200.000.000	98	250.000.000	99	250.000.000	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				150.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	150.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				150.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	150.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000		
Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Timur				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.05.00 01 - KELURAHAN SAIGON	
											7.01.0.00.0.00.05.00 02 - KELURAHAN TANJUNG HULU			
											7.01.0.00.0.00.05.00 03 - KELURAHAN TANJUNG HILIR			
											7.01.0.00.0.00.05.00 04 - KELURAHAN DALAM BUGIS			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													7.01.0.00.0.00.05.00 05 - KELURAHAN PARITMAYOR	
													7.01.0.00.0.00.05.00 06 - KELURAHAN BANJAR SERASAN	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				1.145.000.000		1.205.000.000		1.255.000.000		1.322.000.000		1.475.000.000		
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	95	1.145.000.000	96	1.205.000.000	97	1.255.000.000	98	1.322.000.000	99	1.475.000.000	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				655.000.000		680.000.000		695.000.000		720.000.000		775.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1.570	1.570	655.000.000	1.600	680.000.000	1.600	695.000.000	1.600	720.000.000	1.600	775.000.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	250	500				500				500			
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				105.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000		125.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	250	500	105.000.000	500	110.000.000	500	115.000.000	500	120.000.000	500	125.000.000		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				550.000.000		570.000.000		580.000.000		600.000.000		650.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1.570	1.570	550.000.000	1.600	570.000.000	1.600	580.000.000	1.600	600.000.000	1.600	650.000.000		
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	95	1.145.000.000	96	1.205.000.000	97	1.255.000.000	98	1.322.000.000	99	1.475.000.000	7.01.0.00.0.00.05.00 01 - KELURAHAN SAIGON	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				70.000.000		75.000.000		80.000.000		86.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	190	190	70.000.000	200	75.000.000	200	80.000.000	200	86.000.000	200	100.000.000		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				70.000.000		75.000.000		80.000.000		86.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	190	190	70.000.000	200	75.000.000	200	80.000.000	200	86.000.000	200	100.000.000	7.01.0.00.0.00.05.00 02 - KELURAHAN TANJUNG HULU	
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	95	1.145.000.000	96	1.205.000.000	97	1.255.000.000	98	1.322.000.000	99	1.475.000.000		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				70.000.000		75.000.000		80.000.000		86.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	190	190	70.000.000	200	75.000.000	200	80.000.000	200	86.000.000	200	100.000.000		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				70.000.000		75.000.000		80.000.000		86.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	190	190	70.000.000	200	75.000.000	200	80.000.000	200	86.000.000	200	100.000.000	7.01.0.00.0.00.05.00 03 - KELURAHAN TANJUNG HILIR	
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	95	1.145.000.000	96	1.205.000.000	97	1.255.000.000	98	1.322.000.000	99	1.475.000.000		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				70.000.000		75.000.000		80.000.000		86.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	190	190	70.000.000	200	75.000.000	200	80.000.000	200	86.000.000	200	100.000.000		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				70.000.000		75.000.000		80.000.000		86.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	190	190	70.000.000	200	75.000.000	200	80.000.000	200	86.000.000	200	100.000.000	7.01.0.00.0.00.05.00 04 - KELURAHAN DALAM BUGIS	
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	95	1.145.000.000	96	1.205.000.000	97	1.255.000.000	98	1.322.000.000	99	1.475.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				70.000.000		75.000.000		80.000.000		86.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	190	190	70.000.000	200	75.000.000	200	80.000.000	200	86.000.000	200	100.000.000		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				70.000.000		75.000.000		80.000.000		86.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	190	190	70.000.000	200	75.000.000	200	80.000.000	200	86.000.000	200	100.000.000		
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	95	1.145.000.000	96	1.205.000.000	97	1.255.000.000	98	1.322.000.000	99	1.475.000.000	7.01.0.00.0.00.05.00 05 - KELURAHAN PARITMAYOR	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				70.000.000		75.000.000		80.000.000		86.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	190	190	70.000.000	200	75.000.000	200	80.000.000	200	86.000.000	200	100.000.000		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				70.000.000		75.000.000		80.000.000		86.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	190	190	70.000.000	200	75.000.000	200	80.000.000	200	86.000.000	200	100.000.000		
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	95	1.145.000.000	96	1.205.000.000	97	1.255.000.000	98	1.322.000.000	99	1.475.000.000	7.01.0.00.0.00.05.00 06 - KELURAHAN BANJAR SERASAN	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				70.000.000		75.000.000		80.000.000		86.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	190	190	70.000.000	200	75.000.000	200	80.000.000	200	86.000.000	200	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				70.000.000		75.000.000		80.000.000		86.000.000		100.000.000	7.01.0.00.0.00.05.00 07 - KELURAHAN TAMBELANSAMPIT	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	190	190	70.000.000	200	75.000.000	200	80.000.000	200	86.000.000	200	100.000.000		
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	95	1.145.000.000	96	1.205.000.000	97	1.255.000.000	98	1.322.000.000	99	1.475.000.000		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				70.000.000		75.000.000		80.000.000		86.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	190	190	70.000.000	190	75.000.000	190	80.000.000	190	86.000.000	190	100.000.000		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				70.000.000		75.000.000		80.000.000		86.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	190	190	70.000.000	190	75.000.000	190	80.000.000	190	86.000.000	190	100.000.000		

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4 dibawah ini :

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TIMUR				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Timur	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
			7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN SAIGON				
5.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
6.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.05.0002 - KELURAHAN TANJUNG HULU				
8.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
9.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
10.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.05.0003 - KELURAHAN TANJUNG HILIR				
11.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
12.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
13.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN DALAM BUGIS				
14.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
15.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
16.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.05.0005 - KELURAHAN PARITMAYOR				
17.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
18.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
19.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.05.0006 - KELURAHAN BANJAR SERASAN				
20.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
21.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
22.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN TAMBELANSAMPIT				
23.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
24.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
25.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5 dibawah ini:

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pontianak Timur
Kota Pontianak**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TIMUR									
2.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Pontianak Timur	Indeks	-	3,6	3,65	3,7	3,75	3,8	3,85	
3.	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	Nilai	85	88	90	91	92	93	94	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Timur	Nilai	94,15	94,56	94,66	94,76	94,86	94,96	95,06	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.6 dibawah ini:

**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pontianak Timur
Kota Pontianak**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029. Secara umum, isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Rencana strategis mengandung sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun analis. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025-2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pontianak.

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO